

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN LAYANAN DESA BERDERING DI
DESA BINTAN BUYU KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**

***EFFECTIVITY OF USING RINGING VILLAGE SERVICE IN BINTAN
BUYU REGENCY OF BINTAN PROVINCE OF RIAU***

Abdul Rahman Harahap

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jalan Tombak No. 31 Medan (20222)
abdu037@kominfo.go.id

Diterima : 10 Desember 2015 Direvisi : 16 Desember 2015 Disetujui : 17 Desember 2015

ABSTRACT

Ringing Village Programme is one of Universal Service Obligation from Ministry of Information and Communication Technology allocated for remote regions, outermost region and regions which categorized as left behind village in economic sector. Desa Bintan Buyu is one of the village that received aid from Ringing Village Programme. In 2008 Desa Bintan Buyu is a village that still left behind in economic sector but in 2010 Desa Bintan Buyu transformed become strategical village because central of government located in Teluk Sri Bentan which beside Desa Bintan Buyu. The infrastructure availability either mainroad and telecommunication transform this village become modern village. The question research is whether service of ringing village in area with telecommunication network used effectively by the community. The purpose of this research is to describe the effectivity of the utilization of Ringing Village in telecommunication network area. This research using qualitative method, collection data of using indept interview, the result indicates that Ringing Village Service only used by village officials, community reluctant using this facility because they tend to use mobile phone.

Keywords: *Effectivity, Ringing Village, Bintan Buyu*

ABSTRAK

Program Desa Berdering adalah salah satu program kewajiban pelayanan umum kementerian Komunikasi dan Informatika. Program Desa Berdering diperuntukkan bagi daerah Tertinggal, terpencil, daerah terluar dan daerah belum layak secara ekonomi. Desa Bintan Buyu salah satu desa penerima Program Desa Berdering. Tahun 2008 Desa Bintan Buyu masuk kategori desa kurang layak secara ekonomi. Tahun 2010 Desa Bintan Buyu berubah menjadi desa strategis letaknya karena Pusat Pemerintahan kabupaten Bintan berada di daerah Teluk Sri Bentan yang bersebelahan dengan Desa Bintan Buyu. Ketersediaan Infrastruktur jalan dan Telekomunikasi membuat desa ini menjadi desa yang maju. Pertanyaan penelitian ini adalah Apakah Layanan Telepon Desa Berdering di Area tersedia Jaringan Telekomunikasi di Desa Bintan Buyu dimanfaatkan secara Efektif oleh masyarakat desa? Tujuan penelitian untuk melihat efektivitas pemanfaatan layanan Desa Berdering di area tersedia jaringan telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Layanan Desa Berdering hanya dimanfaatkan oleh Perangkat desa, masyarakat enggan memanfaatkan karena cenderung menggunakan telepon genggam/telepon selular.

Kata Kunci : Efektivitas, Desa Berdering, Bintan Buyu

PENDAHULUAN

Komunikasi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan manusia. Komunikasi yang memadai akan menghasilkan informasi yang berdampak baik bagi kesuksesan setiap kegiatan manusia. Komunikasi merupakan bagian yang amat vital bagi kehidupan seluruh manusia. Komunikasi juga merupakan jantung berjalan lancarnya dunia pendidikan, kegiatan ekonomi dan relasi manusia satu sama lainnya. Komunikasi adalah proses berbagi informasi, ide dan pesan dengan orang lain pada suatu waktu dan tempat tertentu. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan, komunikasi juga turut berkembang. Perkembangan komunikasi dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang sangat cepat secara nyata mempengaruhi pola berkomunikasi masyarakat. Perkembangan ini bertumpu pada masyarakat perkotaan. Hal ini memunculkan kesenjangan informasi antara masyarakat perkotaan dan penduduk pedesaan. Berbanding terbalik dengan masyarakat perkotaan, belum seluruh masyarakat desa terjangkau sarana informasi dan komunikasi yang memadai. Karena itulah timbul kesenjangan informasi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kesenjangan informasi tersebut berdampak buruk bagi masyarakat pedesaan, rendahnya penetrasi teknologi informasi dipedesaan mengakibatkan lambatnya perkembangan ekonomi sehingga mengakibatkan kemajuan dan perbaikan kualitas hidup yang lambat. Untuk menanggulangi kesenjangan informasi tersebut, pemerintah memiliki kewajiban

untuk memfasilitasi terselenggaranya informasi yang adil dan merata serta berkualitas bagi setiap warga masyarakat. Untuk itu pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasi secara berkelanjutan, dan tahap demi tahap yang merambah ke seluruh pelosok tanah air. Melihat kondisi geografis wilayah Indonesia, penyebaran penduduk Indonesia 70 persen berada di daerah pedesaan. Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan puluhan ribu desa yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi itu dianggap vital dalam upaya menuju masyarakat informasi yang telah menjadi kebutuhan dan keharusan dalam menghadapi era globalisasi saat ini.

Memasuki milenium ketiga, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi hingga ke masyarakat desa. Perluasan pembangunan infrastruktur itu dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara masyarakat desa dan kota. Asumsi pemerintah, jika kesenjangan informasi antara desa dan kota tidak segera diatasi akan mengganggu kelancaran pembangunan nasional. Kesenjangan informasi antara kota dan desa akan menimbulkan kesenjangan pula di bidang pembangunan secara keseluruhan, dan hal itu bisa mengganggu harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak tahun 2003 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan Program yang dikenal dengan

Desa Berdering. Melalui KPU/USO (Universal Service Obligation) telah membangun fasilitas telekomunikasi di 2.013 desa pada tahun 2003, dan 2.341 desa pada tahun 2004 yang tersebar di berbagai propinsi. Prioritas utama sasaran program ini adalah desa-desa yang masuk kategori daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan daerah perintisan serta daerah yang tidak layak secara ekonomi. Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program-program prioritas selama lima tahun antara lain Prioritas Nasional Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan Pasca Konflik, termasuk daerah perbatasan. Menyikapi amanat tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2010 telah melaksanakan kebijakan untuk meminimalisir daerah *blank spot*, melalui pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan (USO) secara bertahap yang dimulai dengan Desa Berdering, Desa Pinter dan Desa Informasi. Karena apabila dibiarkan/tidak ditangani secara prosedural maka daerah *blank spot* akan memperbesar kesenjangan akses informasi antara daerah dengan perkotaan. Pemerintah telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), di daerah tertinggal dan daerah perbatasan. Capaian kebijakan tersebut antara lain adalah tersedianya jasa akses layanan komunikasi dan informatika yang mencakup 30.441 Desa Berdering atau 92 % dari target dan 6.694 Desa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) atau 116,5 % (Bappenas, 2013). Data ini memperlihatkan kesungguhan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan *Indonesian Connected*. Kemudian target yang ingin dicapai adalah

Indonesia Informatif Tahun 2014, Indonesia *Broadband* 2015, dan Indonesia Digital tahun 2018.

Akan tetapi sebagai Program Desa Berdering pada tataran Implementasi, dihadapkan pada berbagai permasalahan, mulai dari hal-hal yang bersifat teknologis hingga aspek sosial-budaya. Pada saat Program Desa Berdering dimunculkan 10 tahun yang lalu desa-desa yang mendapat prioritas pembangunan mungkin masih kondisi tertinggal, terbelakang, dan kurang berkembang secara ekonomi. Melihat kondisi desa-desa penerima program telepon berdering saat ini umumnya telah dibangun jaringan telekomunikasi oleh *provider* telepon seluler, seperti pada Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang di mana masyarakat desa telah menikmati fasilitas jaringan telekomunikasi. Hasil pengamatan peneliti bahwa masyarakat pada desa tersebut telah memiliki dan menggunakan telepon seluler dari berbagai layanan operator seperti Telkomsel, Indosat, M3, axis, smart Fren, dan lain-lain.

Asumsi peneliti bahwa dengan tersedianya jaringan telekomunikasi pada desa tersebut maka keberadaan Telepon Pedesaan (telepon untuk Desa Berdering) tidak lagi efektif dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan komunikasi. Hasil pengamatan penulis bahwa keberadaan telepon pedesaan tersebut hanya dimanfaatkan oleh pribadi pengelola yang bekerja pada kantor Desa Bintang Buyu. Program Desa Berdering ini menjadi perhatian peneliti karena kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika c/q Balai Pengelola Penyedia dan Pembiayaan Teknologi Informatika (BP3TI) hingga saat ini masih terus membiayai layanan Telepon Desa Berdering

di daerah Kabupaten Bintan termasuk lokasi penelitian yaitu desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan. Di desa ini terdapat dua titik layanan telepon Desa Berdering. Titik lokasi Layanan Telepon Desa Berdering adalah berada di kantor Kepala Desa. Jika dilihat dari pembiayaan yang dilakukan oleh BP3TI melalui Operator pemenang tender (lelang) terhadap layanan Telepon Desa Berdering sebesar Rp100.000,-/bulan (seratus ribu rupiah) per bulan. Untuk dua titik layanan, pemerintah mengeluarkan Rp200.000,-/bulan. Pemerintah akan terus mengeluarkan biaya layanan terhadap program yang mungkin tidak efektif lagi sesuai dengan tujuan awal program, tentu hal ini menjadi tidak efektif dan akan menguntungkan pribadi pengelola, bukan menguntungkan masyarakat setempat karena masyarakat telah memiliki alat komunikasi seperti telepon genggam (*handphone*). Oleh sebab itulah menarik bagi peneliti untuk melihat efektivitas pemanfaatan Telepon Desa Berdering di desa lokasi Penelitian. Dari latar belakang masalah penelitian dapat diidentifikasi beberapa isu-isu penting yang relevan untuk dibahas yaitu, sebagai berikut :

- a. Pengelola telepon Program Desa Dering di Desa Bintan Buyu kurang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan telepon Desa Berdering
- b. Masyarakat di lokasi penelitian kurang berminat menggunakan layanan telepon Desa Berdering
- c. Tersedianya jaringan telekomunikasi mempengaruhi pemanfaatan Telepon Desa Berdering di Desa Bintan Buyu
- d. Agar penelitian ini tidak menjadi bias terhadap permasalahan-permasalahan lain dan lebih fokus pada pokok permasalahan yang disampaikan di atas, maka dalam

penelitian ini peneliti membatasi pada identifikasi isu-isu penting yang relevan untuk dibahas meliputi bagaimana kondisi layanan Telepon Pedesaan (Program Desa Berdering) di Kabupaten Bintan, Serta aspek pengelolaan dan pemanfaatan Telepon Pedesaan. Penelitian ini tidak melakukan analisis pada aspek pendanaan.

Masalah penelitian dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: Apakah Layanan Telepon Desa Berdering di Area tersedia Jaringan Telekomunikasi di Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan Efektif dimanfaatkan oleh masyarakat? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan Layanan Desa Berdering pada area tersedia Jaringan Telekomunikasi di desa Bintan Buyu. Sedangkan manfaatnya diharapkan mengetahui gambaran kondisi program Desa Berdering di area tersedia jaringan telekomunikasi dan rekomendasinya sebagai salah satu bahan masukan dalam menyusun kembali program lanjutan untuk Desa Berdering di area tersedia jaringan telekomunikasi.

Menurut Winardi (1990), efektivitas adalah suatu tingkat hingga di mana suatu tindakan atau aktivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), pengertian efektivitas adalah ada efek, kiat, pengaruh, kesan, yang dapat membawa hasil guna (usaha dan tindakan). Sedangkan menurut Kumala (1998) efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau untuk menggunakan pengaruh spesifik yang bisa diukur. Secara umum efektivitas juga bisa sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari berbagai macam teori di atas, dapat diartikan

bahwa efektivitas berupa kegiatan yang dilakukan secara optimal (maksimal) dan dapat dicapai melalui rencana yang telah ditetapkan. Ketepatan dalam menggunakan sumber daya secara tepat menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki tercapai dan berhasil guna. Efektivitas sering disebut sebagai indikator untuk mengetahui seberapa jauh program, sistem, atau kinerja dapat diukur. Pada dasarnya yang umum menunjukkan pada taraf pencapaian hasil, sering atau terkadang dikaitkan dengan efisien, walaupun efektivitas dan efisien mempunyai teori yang berbeda. Secara umum perbedaan tersebut dapat dibedakan karena efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih bagaimana mencapai hasil itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Kast & Fremon, 1990).

Menurut Revianto dalam skripsinya Hadi (2010), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang ditargetkan. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Selain itu menurut Westra (1989), Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya.

Georgopualos dan Tennebaum dalam Steers (1985) berpendapat bahwa konsep efektifitas kadang-kadang disebut sebagai

keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan. Selanjutnya dikatakan oleh Georgopualos dan Tennebaum: *"...organization effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, fulfill it's objective without incapacitating it's means and resources and without placing strain upon it's members."*

Chester I. Barnard (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Selanjutnya Gibson menjelaskan efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atau usaha bersama. Definisi lain yang dapat dijadikan acuan ialah menurut Emerson dalam (Handyaningrat, 1990) : Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif. Katz dan Khan (Steers, 1985) berpendapat bahwa efektivitas sebagai usaha mencapai suatu keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara. Berkaitan dengan konsep efektivitas, The Liang Gie berpendapat : Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Menurut Sondang P. Siagian (1985) bahwa efektivitas terkait penyelesaian

pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan Menurut Panji Anoraga (2004) efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja.

Menurut Nogi Tangkilisan (2005), efektivitas menyangkut 2 aspek yang diantaranya adalah sebagai tujuan dan pelaksanaan fungsi (cara untuk mencapai tujuan tersebut). Adapun kriteria atau indikator dari pada efektivitas yakni di antaranya pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi (fleksibilitas), kepuasan kerja, dan tanggung jawab.

Istilah *Universal Service* tercatat pertama kalinya dalam kosa kata sektor telekomunikasi pada tahun 1907. Saat itu Presiden Perusahaan Telekomunikasi terkemuka AT&T, Theodore Vail, mempopulerkan slogan “One System, One Policy, Universal Service” dalam laporan tahunan perusahaan tersebut berturut-turut hingga tahun 1914. Para ahli sejarah dan pengambil kebijakan berpendapat bahwa konsep yang disampaikan oleh Vail tersebut mengacu kepada kebijakan untuk mempromosikan *affordability* jasa telepon melalui subsidi silang (Mueller Jr., 1997 dalam Purnomo, 2011). Sesuai perjalanan waktu, konsep *Universal Service* kemudian diartikan bahwa setiap rumah tangga dalam suatu negara memiliki sambungan telepon, biasanya telepon tetap. Namun mengingat definisi di atas hanya layak untuk negara maju, maka kemudian muncul pula istilah *Universal Access* yang bisa dijangkau dan lebih sesuai dengan praktek-praktek di negara berkembang. *Universal Access* diartikan bahwa setiap orang dalam suatu kelompok

masyarakat haruslah dapat melakukan akses terhadap telepon publik yang tidak harus tersedia dirumah mereka masing-masing. *Universal Access* ini biasanya dapat diperoleh melalui telepon umum, warung telekomunikasi atau kios sejenis, *multipurpose community center*, dan berbagai bentuk fasilitas sejenis (ITU, 2003). Dalam banyak literatur, istilah *Universal Service* dan *Universal Access* ini kemudian sering dipakai pada saat bersamaan dan sering pula dipertukarkan tanpa mengubah arti masing-masing. Sebenarnya tujuan konsep *Universal Service* dan *Universal Access* tidaklah semata-mata untuk menyediakan fasilitas telekomunikasi kepada seseorang atau kelompok masyarakat saja, tetapi adalah untuk :

- a. meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
- b. mempromosikan proses kohesi sosial dan politik melalui pembauran komunitas yang terisolir dengan komunitas umum/maju;
- c. meningkatkan cara dan mutu penyampaian jasa-jasa publik pemerintah;
- d. memacu keseimbangan distribusi populasi; dan
- e. menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara *information rich* dan *information poor*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Rakhmat (2000), metode deskriptif adalah metode yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa apa adanya, tanpa mencari dan menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif hanya memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Tujuan penelitian ini untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Suryabrata, 2003).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei tahun 2014. Desa Bintan Buyu dipilih sebagai objek kajian adalah karena Desa Bintan Buyu salah satu desa penerima Program *Universal Service Obligation* (USO). Pada tahun 2008 desa ini merupakan desa terpencil. Sarana transportasi ke desa ini kurang memadai, sehingga desa Binta Buyu masuk kategori penerima program USO. Kondisi pada saat penelitian, Desa Bintan Buyu merupakan daerah maju. Sarana transportasi dan akses masyarakatnya sangat mudah. Secara geografis desa ini sekarang berada kurang lebih 3 KM dari Bandar Sri Bentan pusat pemerintahan Kabupaten Bintan. Akses menuju kantor Bupati Bintan berada kurang lebih 1 KM dari Desa Bintan Buyu.

Penentuan subjek maupun informan penelitian menggunakan pertimbangan *Snowball sampling* (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan) sehingga memungkinkan melibatkan pihak di luar lokasi penelitian yang dipandang mengerti dan memahami kehidupan individu-individu sebagai anggota masyarakat lokasi penelitian (Bungin). Penentuan mengenai siapa yang harus menjadi informan kunci harus melalui beberapa pertimbangan diantaranya: (1) orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti; (2) usia orang yang bersangkutan telah dewasa; (3) orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani; (4) orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai

kepentingan pribadi untuk menjelek-jelekan orang lain; (5) orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang diteliti; dan lain-lain (Bungin, 2011)

Informan penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 orang pegawai kantor Desa Bintan Buyu yaitu Kepala Urusan Pembangunan, Bendahara, Kepala Urusan Kesra, Sekretaris, dan staf kantor Desa dan 5 orang warga masyarakat Desa Bintan Buyu, yaitu 1 orang petani karet, 1 orang pedagang, 1 orang pelajar SMA, 1 orang mahasiswa, dan 1 orang wiraswasta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Bungin, 2011). Kegiatan dokumentasi juga dilakukan yakni mengumpulkan data melalui dokumen, kajian ilmiah, buku, perundang-undangan, internet, maupun situs badan publik. Observasi, pengamatan langsung di lapangan dan mencatat fenomena yang terkait dengan kondisi dan pemanfaatan Telepon Desa Berdering di Desa Binta Buyu Kabupaten Bintan. Proses penggalian data mempertimbangkan model triangulasi. Data penelitian direkam dan dicatat melalui teknik pengamatan langsung dan wawancara mendalam tak berstruktur. Dokumen juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

melalui tiga tahap analisis data kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di manca-negara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 Km² saja. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 90,96 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah di antaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Jarak antar kota, Bandar Seri Bentan merupakan ibu kota Kabupaten Bintan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan. Tambelan merupakan Ibu Kota kecamatan. Tambelan yang memiliki jarak terjauh dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu 360 Km. sedangkan Bandar Seri Bentan yang terletak di satu kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu di kecamatan Teluk Bintan memiliki Jarak yang paling dekat yaitu 1 Km, (www.bintankab.go.id, diakses oktober 2014). Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu

yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya terletak di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung Malaka. Setelah Sultan Riau meninggal pada Tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai Districh Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling yaitu: Afdelling Tanjung Pinang yang meliputi Kepulauan Riau–Lingga, Indragiri Hilir dan Kateman yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan sebagai penguasa ditunjuk seorang Residen. Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat dan diperintah oleh Asisten Residen (dibawah) perintah Residen. Pada 1940 Keresidenan ini dijadikan Residente Riau dengan dicantumkan Afdelling Bengkalis (Sumatera Timur) dan sebelum Tahun 1945–1949 berdasarkan Besluit Gubernur General Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 Nomor 9 dibentuk daerah Zelf Bestur (daerah Riau). Berdasarkan surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 Nomor 9/Depart. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II

yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut :

1. Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah kecamatan Bintan Selatan (termasuk kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur sekarang).
2. Kewedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
3. Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.
4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

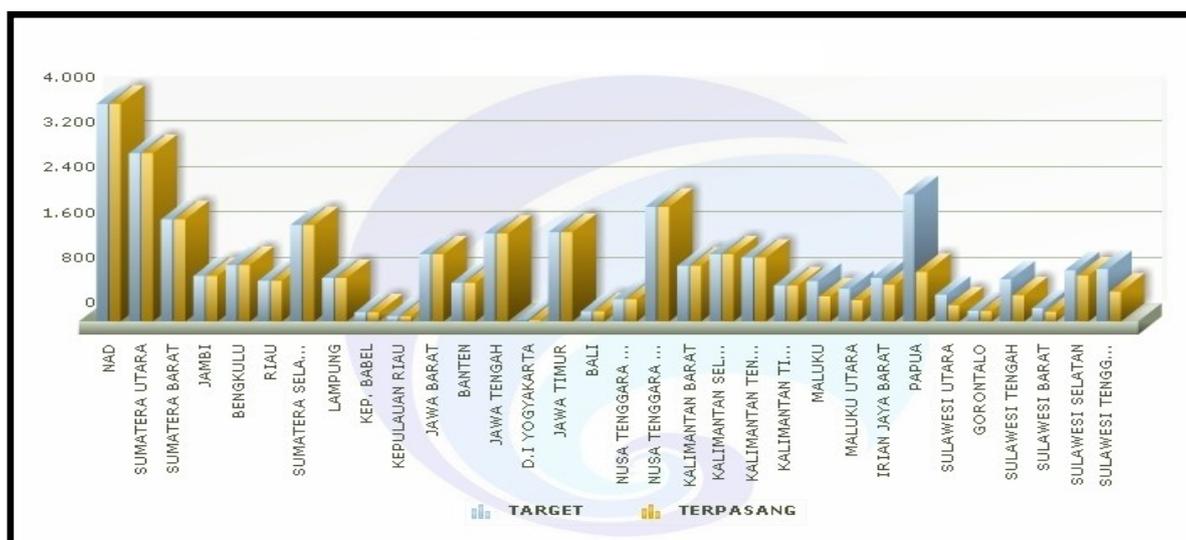
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan, yaitu Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebagian wilayah Galang dicakup oleh Kota Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa yaitu Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi

Kota Tanjungpinang yang statusnya sama dengan Kabupaten.

Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada akhir Tahun 2003, maka dilakukan pemekaran Kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir Tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan Undang-Undang No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Bintan meliputi enam kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor : 12 Tahun 2007 telah dibentuk empat kecamatan baru sehingga saat ini Kabupaten Bintan memiliki sepuluh kecamatan, yaitu Kecamatan Tuapaya hasil pemekaran dari Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Mantang adalah pemekaran dari Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Sri Kuala Lobam adalah hasil pemekaran Kecamatan Bintan Utara, (www.bintankab.go.id, diakses oktober 2014)

Program Desa Dering merupakan bagian dari layanan program Kewajiban Pelayanan Umum atau *Universal Service Obligation* (KPU/USO) yang ditargetkan sebanyak 40.025 desa tersentuh penggunaan layanan komunikasi tersebut. Program yang dirintis sejak tahun 2003/2004 ini mencanangkan sebanyak 40.025 desa menjadi target Desa Dering. Berdasarkan data BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informasi, hingga tahun 2011, Desa Berdering sudah mencapai 30.182 unit dari target sejumlah 33.184 unit.



Gambar 1. Desa Berdering yang Terpasang

Sumber : Permenkominfo Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008.

KPU/USO singkatan dari Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation merupakan program pemerataan pembangunan di bidang telekomunikasi yang diarahkan pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yakni desa tertinggal, terpencil, daerah perbatasan, daerah rintisan dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi.

Adapun tujuan Program KPU/USO adalah untuk mengatasi kesenjangan digital, menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan, mencerdaskan bangsa, dan pemenuhan komitmen Indonesia di WSIS (World Summit Information Society). Sedangkan manfaat Program KPU/USO adalah komunikasi Kepala Desa dan Pemerintahan Kabupaten lancar, dan dapat mengurangi biaya perjalanan dinas dari kota ke desa, pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah dan efisien, membantu masyarakat desa dalam mencari referensi lewat internet lebih mudah,

sosialisasi ke sekolah sekolah tentang pemanfaatan Internet secara Aman dan Sehat melalui Mobil Internet Keliling, dan pemerataan pembangunan telekomunikasi Program KPU/USO terdiri dari :

- a) Desa Dering : berupa layanan telepon dan SMS (Short Message Service) umum untuk daerah terpencil, daerah perintisan, perbatasan, daerah yang belum layak secara ekonomis dan semua desa yang belum mempunyai fasilitas tersebut sebanyak 33.184 desa.
- b) Desa Pinter : setiap lokasi Desa Dering akan ditingkatkan dengan penambahan jasa layanan internet, sebanyak 1.330 lokasi.
- c) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) : merupakan penyediaan sarana umum untuk melakukan akses internet kecamatan di 5.748 lokasi dan telah bertambah menjadi 6.358 lokasi.
- d) M-PLIK : berupa layanan PLIK yang dilengkapi dengan mobil sehingga

- dapat berpindah-pindah di suatu wilayah kabupaten sebanyak 1.907 unit.
- e) Sarana Pendukung PLIK, yaitu SIMPLIK: guna memonitor operasional PLIK, menyediakan *push content* yang sehat dan bermanfaat serta menyediakan *bandwidth* yang cukup dan efisien.
 - f) Nusantara *Internet Exchange* (NIX) : berupa *switch* pengatur trafik internet domestik agar penggunaan *bandwidth* lebih efisien dan layanan *data center* (*push content*) di 32 ibukota propinsi.
 - g) *International Internet Exchange* (IIX) : berupa *switch* pengatur trafik internet internasional agar penggunaan *bandwidth* lebih efisien, di empat ibukota propinsi.
 - h) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif: merupakan penyediaan sarana umum untuk melakukan akses internet di pusat sentra produktif yang diusulkan instansi teknis terkait di 1.235 lokasi.
 - i) *Wifi* Kabupaten : merupakan penyediaan *hotspot* akses internet di 745 lokasi di kabupaten.
 - j) *Telinfo Tuntas* : berupa penyediaan sarana ICT (BTS) di perbatasan dan pulau terluar 9 paket pekerjaan di 198 lokasi (kecamatan).
 - k) SIMMNIX : sarana pendukung untuk memonitor operasional NIX.

Dalam mendukung program Pemerintah Pusat, maka juga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan KPU/USO antara lain membantu melakukan sosialisasi pemanfaatan fasilitas telekomunikasi USO, monitoring dan pengawasan fasilitas telekomunikasi USO yang sudah dibangun, mendorong pemanfaatan fasilitas telekomunikasi USO untuk meningkatkan perekonomian dan

meningkatkan kecerdasan masyarakat, dan pembangunan TIK di daerah tidak hanya berupa infrastruktur tetapi juga diikuti dengan pembinaan kepada masyarakat dan pengembangan aplikasi konten. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sudirman, 2002).

Sasaran pemanfaatan layanan Desa Dering di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang biasanya dipakai untuk menghubungi RT/RW, pihak kecamatan dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam pengurusan administrasi kependudukan. Apabila ditemukan persyaratan administrasi kependudukan belum lengkap maka pihak RT/RW dan pihak Kecamatan memberitahukan masyarakat tersebut melalui telepon desa agar segera melengkapi persyaratan administrasi kependudukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Hadi (Kaur Pembangunan) berusia 45 tahun yang telah bekerja selama 13 tahun, dapat dijelaskan bahwa sasaran telepon desa juga dilakukan untuk menghubungi RT/RW untuk pendistribusian beras miskin (raskin). Dalam hal ini, hasil kegiatan tersebut mendekati sasaran. Artinya efektivitas pemanfaatan Desa Berdering di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang sangat tinggi terhadap upaya untuk memberikan pelayanan sehingga masyarakat dapat ikut menikmati arus informasi yang mereka butuhkan melalui pesawat telepon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana layanan Telepon Dering di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang sebagai berikut :

1. Desa Bintang Buyu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Teluk Bintang, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 35 Dusun dengan jumlah penduduk 2.412 jiwa.
2. Pesawat Telepon di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang pertama kali masuk pada tahun 2008. Yang mendistribusikan Telepon Desa di Desa Bintang Buyu adalah pihak Telkom. Tahun 2010 Telepon Desa ada 2 (dua) unit. Setiap bulannya mendapat *voucher* pulsa senilai Rp. 100.000,- sampai bulan April 2014.
3. Sampai tahun 2012, telepon ini tetap dimanfaatkan oleh perangkat desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang. Namun pada tahun 2012, 1 (satu) unit pesawat telepon butuh perawatan disebabkan baterai harus dicas dayanya.
4. Pada akhir tahun 2013, 2 (dua) unit Telepon Desa mengalami kerusakan. Oleh pihak Telkom hanya memperbaiki 1 (satu) unit yang dapat dioperasikan. Sejak Bulan Mei 2014 sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh kelurahan.
5. Belum maksimalnya fasilitas BTS/tower yang sangat dibutuhkan untuk melakukan operasional Telepon Desa.

Dari hasil penelitian di atas, maka efektivitas dari sumber daya dan sarana untuk memenuhi tujuan dan sasaran layanan Desa Dering di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang tidak memberi manfaat yang berkelanjutan terhadap pelaksanaannya sehingga target yang akan dicapai tidak terpenuhi. Artinya, efektivitas sumber daya dan sarana layanan Desa Berdering di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang sangat rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, di mana semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya”. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Tujuan program KPU/USO terhadap program Desa Berdering adalah untuk mengatasi kesenjangan digital atau kesetaraan akses teknologi informasi dan komunikasi, selain itu pula bertujuan untuk menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga merupakan komitmen pemerintah Indonesia di WSIS (World Summit Information Society). Hasil wawancara dengan Ibu Umiarti (Petani) berusia 64 tahun dan Sdr. Januardi (Wiraswasta) berusia 37 tahun menyatakan perangkat Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang belum pernah menyampaikan ke masyarakat bahwa telepon desa ada di kantor desa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dari rangkuman hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa tujuan program Desa Berdering di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang belum banyak diketahui oleh masyarakat desa. Artinya, tujuan program Desa Berdering belum tercapai, maka hal itu dikatakan belum efektif. Dari beberapa pendapat, penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang ditargetkan. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses

pencapaian tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya.

Beberapa faktor yang menghambat proses pemanfaatan layanan Desa Berdering di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang antara lain :

1. Dalam pengoperasian telepon Desa di Desa Bintang Buyu, tidak seluruh masyarakat terlibat dalam pemanfaatan layanan Desa Berdering. Seharusnya, masyarakat desa sebagai pihak yang berperan dalam program pembangunan daerah adalah pelaku dalam proses perubahan sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan, bukan sekedar obyek pembangunan.
2. Kurangnya informasi dan pengetahuan dalam penggunaan layanan Desa Berdering, sehingga efektivitas pemanfaatan layanan Desa Berdering di Desa Bintang Buyu belum tercapai sepenuhnya.
3. Proses sosialisasi pemanfaatan layanan Desa Berdering kepada warga desa masih kurang dilaksanakan, sehingga masyarakat Desa Bintang Buyu masih ada yang tidak mengetahui pemanfaatan layanan Desa Berdering yang berada di kantor Desa.
4. Keterbatasan fasilitas dan peralatan layanan Desa Berdering di Desa Bintang Buyu mempengaruhi operasional telepon desa tidak memberi manfaat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa pemanfaatan Program Desa Berdering di Desa Bintang Buyu terbatas pada pegawai kantor desa dalam memberikan pelayanan informasi

kepada masyarakat melalui kepala-kepala dusun 35 kepala dusun sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti pembagian Beras Raskin, Pemenuhan Persyaratan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan informasi pembangunan dari Pemerintah Kabupaten yang disampaikan melalui Kantor Kepala Desa. Pemanfaatan sumber daya dan sarana untuk memenuhi tujuan dan sasaran layanan Desa Berdering di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang belum memberi manfaat yang berkelanjutan terhadap pelaksanaannya sehingga target yaitu pemanfaatan layanan telepon oleh masyarakat untuk berkomunikasi jarak jauh dengan sanak keluarga belum tercapai dan belum terpenuhi. Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang merupakan daerah tersedia jaringan telekomunikasi. Adanya layanan operator/vendor seperti Telkomsel, Indosat, Axis dan lain-lain, menyebabkan masyarakat cenderung memilih untuk memanfaatkan telepon genggam/telepon seluler untuk melakukan komunikasi dengan daerah luar. Kondisi ini meyebabkan Program Desa Berdering di Desa Bintang Buyu kurang efektif pemanfaatannya oleh masyarakat desa. Pemanfaatan layanan Desa Berdering oleh masyarakat belum efektif disebabkan adanya anggapan dari anggota masyarakat bahwa adanya telepon desa (program Desa Berdering) hanya diperuntukkan bagi aparat desa (Pihak Kantor desa dan kurangnya Sosialisasi membuat Program Desa Berdering di Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang kurang diketahui oleh sebahagian besar masyarakat.

Beberapa hal perlu menjadi perhatian instansi terkait untuk memaksimalkan kebijakan terkait program Desa Berdering, salah satunya adalah perlunya peningkatan

fungsi Program Desa Berdering di Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan, bukan hanya penyediaan telepon desa tetapi menambah fungsi penyediaan Jaringan Internet yaitu Desa Punya Internet (Desa PINTER), sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan akses informasi dan komunikasi untuk berinteraksi dengan daerah luar. Diharapkan juga pihak pengelola memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Bintan Buyu untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan program Telepon Desa Berdering. Dukungan Pemerintah daerah Kabupaten Bintan juga dibutuhkan terhadap keberhasilan program Desa Berdering, terutama mengintensifkan sosialisasi Program Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut kepada masyarakat wilayah Bintan Buyu. Kabupaten Bintan merupakan daerah penyangga perbatasan dengan negara tetangga, oleh karenanya kemudahan akses informasi dan komunikasi perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan perhatian Pemerintah Pusat melalui peningkatan Program *Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Umum (USO/KPU)* Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga masyarakat memiliki daya saing terhadap pengaruh kemajuan negara tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kumala. (1998). *Kamus Dornald*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muller K. (2004). *Ekologi Kamoro-Bab IX. PapuaWeb*. Galeri-Galery, diakses dari <http://www.papuaweb.org/gb/foto/muller/ecology/09/index.html>.
- Rakhmat, J. (2000). *Metode Penelitian Komunikasi*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Siagian, S. P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siregar, A. R. (2004). *Perpustakaan : Energi Pembangunan Bangsa*. Medan : USU Press.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Gaya Media*. Yogyakarta.
- Sulistyo, B. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suryabrata, S. (2003). *Metode Penelitian*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Tangkilisan, H.N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia
- Westra, P. (1989). *Kamus Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Winardi. (1990). *Ilmu Ekonomi dan Aspek-aspek Metodologisnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- www.bps.go.id dan www.pajak.go.id
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet_Indonesia#Internet_Service_Provider_Indonesia
- <http://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/Events/2011/ITU-ADB/Indonesia/Session2-BP3TI.pdf> <http://id.wikipedia.org>